

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Konstitusi negara Republik Indonesia (UUD 45) mengamanatkan bahwa setiap warga bangsa, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti pada tingkatan praksis, pembangunan sumber daya manusia (*human recourches building*) Indonesia harus ditempatkan pada prioritas utama secara proporsional dan tidak bisa dilakukan secara artifisial dan sekedar 'tambal sulam'. Apalagi pada konteks global (*kapitalisme*), peningkatan mutu dan peningkatan SDM Indonesia merupakan hal yang mutlak sebagai prasyarat dari model interaksi global yang kompetitif. Pendidikan disepakati oleh banyak ahli memiliki peran yang besar dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan daya saing yang tinggi (Zainuddin, 2010:272).

Untuk pemberdayaan pendidikan, bukan hanya dalam mempersiapkan SDM yang memiliki excellence dan competitive advantage ditegah persaingan global yang kian intens, tetapi dalam pembentukan masyarakat (pendidikan karakter). Pendidikan nasional masih banyak memiliki kelemahan mendasar, terbukti belum berhasilnya meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan anak didik, melainkan gagal dalam membentuk karakter dan kepribadian. Pembentukan karakter dan kepribadian ini sangat penting bahkan

sangat mendesak memanda masih berkelanjutannya berbagai krisis yang melanda bangsa ini (Azyumardi, 2002:14).

Diskursus di atas semakin menjadi kronis ketika pada tingkatan skala nasional berimplikasi terhadap munculnya ketimpangan struktur institusi kemasyarakatan yang terpusat pada golongan strata atas. Disisi lain, kemiskinan dan keterbelakangan menghalangi dan menghambat warga masyarakat yang hidup dibawah standar garis kemiskinan sulit memperoleh hak-hak dan kesempatan yang seharusnya mereka dapatkan. Akibatnya mereka tetap terbelakang baik secara ekonomis, politis dan sosial. Maka tak heran, apabila kita ingin menjadi garda depan dalam peradaban dunia, maka ada beberapa aspek yang mesti diteguhkan secara konsisten. Hal ini haruslah dilengkapi dengan prasarana pendidikan dan disiplin ilmu yang memadai. Keunggulan kurikulum yang dimiliki MAN I Pati tersebut juga ditunjang dengan kondisi sosio-kultural pesantren. Tradisi pendidikan pesantren yang merakyat (*tidak elitis*) merupakan modal yang berharga bagi pengembangan pendidikan yang lebih humanis, pluralis. Sehingga akan tercipta suatu masyarakat terpelajar (*education society*) yang turut serta berpartisipasi dalam proses pendidikan. Dengan kata lain pendidikan sepanjang hayat perlu diperluas pemahamannya, bukan hanya penyesuaian diripada perubahan dalam hakekat pekerjaan. Tetapi juga merupakan proses berlanjut pembentukan manusia seutuhnya, pengetahuan dan bakat, k cakapan kritis dan kemampuan berbuat (Syafaruddin, 2005:215)

Hal di atas terbukti ketika pendidikan di negara kita semakin mahal, banyak kelompok masyarakat yang benar-benar berada dibawah garis kelayakan menyelenggarakan pendidikan (Mastuhu, 2008:43).

Sementara pemerintah disibukkan dengan usaha penyediaan berbagai fasilitas pendidikan, karena itu pula jumlah warga negara yang membutuhkan pendidikan berlipat ganda, sehingga fasilitas yang ada teta p tidak mencukupi. Dengan berbagai macam parameter keberhasilan, pada hakekatnya, pendidikan nasional kita selama 25 tahun telah tidak menunjukkan kemajuan,bahkan kemunduran. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik baik di dalam manajemen maupun di dalam penyusunan kurikulum harus diubah dan disesuaikan kepada tuntutan pendidikan yang demokratis. Demikian pula di dalam menghadapi kehidupan global yang kompetitif dan inovatif, maka proses pendidikan haruslah mampu mengembangkan kemampuan untuk berkompetisi di dalam kerja sama, mengembangkan sikap inovatif dan ingin selalu meningkatkan kualitas (Tilaar, 2004:19).

Secara internal, madrasah tidak jauh dengan keadaan sekolah umum; lemah dalam administrasi dan manajemen pelajaran. Tetapi masalah krusial adalah kurangnya tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi. Ini berakibat pada prestasi belajar siswa relatif cukup rendah. Secara eksternal, kondisi yang melingkupi madrasah lebih rumit lagi. Setidaknya ada 3 hal yang secara umum mempengaruhi performa di atas. *Pertama*, Sikap diskriminatif pemerintah terhadap madrasah di mana madrasah selalu dianaktirikan

meskipun madrasah sudah diposisikan sederajat dengan sekolah umum dengan diperkuat UU No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa “sekolah umum yang berciri khas Islam”. Tapi implementasinya tetap mengacu kepada UU No.4 Tahun 1950 yang mengabaikan madrasah. Ini setidaknya bisa dilihat dari *unit cost system* madrasah yang jauh lebih kecil dari sekolah umum. Namun dengan terbitnya UU No.20 Tahun 2003 di mana madrasah secara hukum dapat dikatakan “sama dan sebangun” dengan sekolah, madrasah benar-benar mendapat hak dan perhatian yang sama. *Kedua*, tingkat kepedulian masyarakat terhadap madrasah yang relatif kurang. Madrasah selalu diklaim unik dengan basis yang mengakar kuat di masyarakat. Tapi kalau ditinjau lebih jauh perhatian masyarakat terhadap eksistensi madrasah masih bersifat elastis, terbatas pada kalangan tertentu saja. *Ketiga*, rendahnya apresiasi masyarakat intelektual dan penulis muslim. Sejauh ini intelektual muslim sendiri tidak banyak konsen dan menulis tentang madrasah, khususnya dengan memanfaatkan media masa, keadaan ini diperparah dengan jarangya media cetak maupun elektronik dalam mengangkat reportase tentang dunia madrasah (Anonim, 2005:3)

Secara garis besar pencapaian pendidikan nasional masih jauh dari harapan, apalagi untuk mampu bersaing secara kompetitif dengan perkembangan pada tingkat global, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Berbeda dengan peran pendidikan pada negara – negara maju dimana peran pendidikan pada dasarnya lebih terbatas pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih luas lagi pembudayaan yang tentu saja meliputi bidang yang sangat luas.

Duignan dan Macpherson (1992) menyatakan “ Kami menganggap bahwa mutu kehidupan sekolah sangat bergantung pada mutu pengalaman pelajar di dalam ruang kelas. Selanjutnya kami juga menganggap, bagi bahwa kepemimpinan pendidikan akan menjadi sentral bagi negosiasi tentang apa yang bisa dinilai dalam kurikulum dan apa yang dipandang baik dalam metode pengajaran. Pendekatan terhadap kepemimpinan ini akan menjaga ide-ide praktis yang patut ditiru. Untuk mencapai kondisi ini, maka keunggulan perlu didefinisikan dalam terma-terma yang spesifik. Ia juga mengandung makna sebagai perencanaan yang cerdas untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, pemimpin pendidikan harus bertanggung jawab dalam menciptakan kultur organisasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan partisipasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran” (Tony Bush, 2010: 79)

Reformasi kehidupan nasional secara singkat intinya bertujuan untuk membangun indonesia yang lebih genuinely dan authentically demokratis dan berkeadaban sehingga betul-betul menjadi Indonesia baru yang demokratis dan bersatu padu (*integrated*). Dan pendidikan nasional dengan berbagai jenjang dan jalurnya merupakan sarana paling strategis untuk mengasuh, membesarkan dan mengembangkan warga negara yang demokratis dan memiliki keadaban (*civility*). Pada sisi internal, di masa sekarang sekolah/madrasah haruslah melakukan upaya membangun sistem kelembagaan yang efisien. Secara eksternal sekolah/madrasah haruslah memperhitungkan reputasi dan legitimasi di mata masyarakat, dengan asumsi,

jika reputasi dan legitimasi itu bagus, maka sekolah/madrasah akan dengan mudah meraih dukungan dari masyarakat. Dukungan masyarakat adalah modal yang berharga bagi pengembangan dunia pendidikan (Zainuddin, 2010: 276).

Upaya meningkatkan mutu pendidikan madrasah, tidak bisa terlepas dari upaya perbaikan manajemennya. Sebagai salah satu komponen penting dalam proses pendidikan, manajemen madrasah memang masih tampak kelemahan-kelemahan. Selama ini manajemen madrasah memang kurang mampu menciptakan produk sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Sesuatu dianggap berkualitas jika barang atau jasa memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Oleh karena itu, kualitas bukanlah merupakan tujuan akhir, melainkan sebagai alat ukur dari standar yang ditentukan dan tidak harus mahal (Nurkolis, 2008:67)

Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang ketat fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggara pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu (Anonim, 2006:61).

Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Dalam hal ini terdapat jurang yang dalam dan luas antara generasi yang satu dengan yang lain, guru harus menjembatani jurang itu bagi peserta didik, jika tidak, maka hal ini dapat mengambil bagian dalam proses belajar yang berakibat tidak menggunakan potensi yang dimilikinya. Tugas guru adalah memahami bagaimana keadaan jurang pemisah ini, dan bagaimana menjembatannya secara efektif. Jaddi yang menjadi dasar adalah pikiran-pikiran tersebut, dan cara yang dipergunakan

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab III Pasal 4 menyatakan:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa .
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna .
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat .
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan , membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat .

6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan ().

Dari penjelasan tersebut dapat kita uraikan bahwa penyelenggaraan pendidikan hendaknya selalu berpedoman dan memenuhi standar mandiri, sesuai dan memenuhi potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Semua itu tidak lepas dari peran guru yang dijelaskan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Bab III Pasal 7 menyatakan :

1. Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idialisme
 - b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia
 - c. memiliki kualifikasi akademik dan latar pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas
 - d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
 - e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
 - f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
 - g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
 - h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, - dan

- i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
2. Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi (Anonim, 2007:9)

Oleh karena itu untuk mewujudkan semua itu diperlukan kepala sekolah/madrasah yang profesional yang dapat mendorong tenaga kependidikan untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam meningkatkan kualitas sekolah/madrasah. Kepala sekolah/madrasah sebagai pemimpin tertinggi yang sangat berpengaruh dan menentukan kemajuan sekolah/madrasah harus memiliki kemampuan administrasi, memiliki komitmen tinggi dan luwes dalam melakukan tugasnya (E. Mulyasa, 2009: 78).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitiannya adalah “Bagaimana karakteristik kepemimpinan sosial kepala MAN I Pati”. Fokus tersebut dijabarkan menjadi tiga sub fokus sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik kepemimpinan kepala MAN I Pati diorganisasi sosial?

2. Bagaimana karakteristik hubungan kerja kepala madrasah dengan dengan guru di MAN I Pati
3. Bagaimana ciri-ciri kepemimpinan kepala MAN I Pati pada masyarakat sekitar.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik pemimpin kepala MAN I Pati diorganisasi sosial
2. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik hubungan kerja kepala madrasah dengan guru di MAN I Pati
3. Untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri kepemimpinan kepala madrasah pada masyarakat sekitar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan penjelasan kepada yayasan pengelola pendidikan tentang bagaimana kepemimpinan sosial yang baik yang dapat diterapkan di madrasah
2. Memberikan contoh kepada instansi terkait bagaimana kepemimpinan sosial itu bisa dilakukan/ diterapkan dalam sekolah/madrasah

3. Memberikan sumbangan pikiran kepada kelompok kerja kepala (KKM) MAN I Pati bagaimana kepemimpinan sosial itu dapat diterapkan di madrasah
4. Memberikan gambaran secara umum kepada instansi terkait bagaimana hubungan kerja yang baik antara guru dengan kepala sehingga tercipta suasana yang harmonis dalam mengelola pendidikan/madrasah
5. Memberikan penjelasan kepada kelompok kerja kepala (KKM) tentang bagaimana ciri – ciri kepemimpinan kepala madrasah pada masyarakat yang baik dan dapat diterapkan di madrasah.

E. Daftar Istilah

1. Kepemimpinan Sosial adalah perilaku kepemimpinan seseorang dalam bergaul atau berhubungan dengan manusia atau masyarakat yang ada di sekitarnya.
2. Kepemimpinan organisasi sosial adalah kemampuan kepemimpinan yang dimiliki seseorang dalam memimpin suatu kelompok masyarakat atau organisasi sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat .
3. Hubungan kerja guru adalah hubungan yang dibangun oleh kepala madrasah dengan guru dan kerjanya guna membangun sebuah madrasah sesuai dengan visi dan misi didirikannya madrasah tersebut.
4. Kepala madrasah adalah seseorang dengan kapasitas dan kompetensi tertentu yang telah ditunjuk oleh kepala kantor kementerian atau ketua yayasan sebagai pemimpin, administrator, manajer (pengelola), dan sebagai supervisor pada sebuah madrasah.